

# PANCASILA: PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGARUH PEDAGANG ISLAM DI AWAL KEBANGKITAN NASIONAL

Sulfan

Pascasarjana, STAI Al-Furqan Makassar  
Email: sulfansulfanbima@gmail.com

*Submitted: 1 April 2024; Revised: 10 May 2024; Accepted: 29 May 2024*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah menemukan dan mendeskripsikan tentang pemikiran ekonomi kerakyatan serta bagaimana pengaruh perdagangan Islam di awal kebangkitan nasional. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan jenis kajian pustaka. Hasil kajian dalam penelitian ini menemukan bahwa masuknya pengaruh Kolonial Eropa dan bangkitnya kekuatan priyayi dengan lahirnya Kerajaan Mataram. Menyebabkan posisi Islam secara politik berada pada kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam bahasa Kuntowijoyo umat Islam mengalami marginalisasi-periferalisasi yang menjadikan Islam sering kali tampil sebagai pelopor aksi protes terhadap penguasa baik pada Pemerintah Kolonial Belanda maupun kepada penguasa priyayi lokal. Pada masa tumbuhnya kesadaran nasional Indonesia yang juga dimotori oleh umat Islam. Yang datang tidak lewat bangku sekolah yang disediakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

**Kata Kunci:** Pemikiran Ekonomi; Perdagangan Islam; Kebangkitan Nasional

## ABSTRACT:

*The purpose of the research is to find and describe the thoughts of the people's economic and how the influence of Islamic trade at the beginning of the national awakening. The research method is descriptive qualitative with the type of literature review. The results of the study in this study found that the entry of the influence of European colonialism and the rise of priyayi power with the birth of the Mataram Kingdom. Causing the position of Islam politically to be in an unfavorable condition. In the language of Kuntowijoyo, Muslims experienced marginalization-peripheralization which made Islam often appear as a pioneer of protest actions against the authorities both to the Dutch Colonial Government and to local priyayi rulers. During the growth of Indonesia's national consciousness, which was also driven by Muslims. It did not come through the school bench provided by the Dutch Colonial Government.*

**Keywords:** Economic Thought; Islamic trade; National awakening

## PENDAHULUAN

Bentuk konkrit dari kemerdekaan dapat terlihat dari adanya kebebasan dalam akses pengelolaan ekonomi. Bangsa yang berada dalam kondisi terjajah harus menerima kenyataan pahit bahwa hasil-hasil kekayaan mereka dinikmati oleh negara penjajah. Kondisi ekonomi yang jauh dari kata sejahtera menjadi kenyataan hidup yang mesti dialami setiap hari.

Indonesia sebagai bangsa yang turut mengalami penjajahan dengan kesadaran kaum-kaum terdidik menemukan kembali kediriannya. Kemerdekaan menjadi jembatan bagi kebebasan dalam mengatur segala hal termasuk ekonomi. Bila mencermati lebih jauh

kehadiran kaum-kaum terdidik dengan berlatar ekonomi menengah memberikan kesadaran betapa kaum penjajah memiliki akses yang besar dalam pengelolaan ekonomi.

Secara struktur bangsa terjajah telah mengalami pemiskinan bahkan kebebasan menentukan tanaman pun menjadi hak penjajah. Ketimpangan itu telah berkontribusi menjauhkan bangsa terjajah dari kesejahteraan. Akses besar kaum penjajah dalam mengatur segala urusan ekonomi membuat kemelaratan dan ketidakberdayaan menjadi jatah hidup bangsa terjajah.

Bila meminjam istilah Karl Marx perjuangan kelas menjadi tidak terhindarkan bagi bangsa terjajah. Pilihan melawan menjadi bagian dari sejarah yang tidak mampu dihindari. Yang menarik dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah kesadaran kelas itu pernah muncul dari kalangan agamawan dengan latar pedagang.

Sarekat Dagang Islam memelopori perjuangan melawan kaum penjajah dengan menggalang kekuatan berbasis pedagang. Persaingan yang timpang dalam perdagangan memberikan kesadaran perlunya membangun kekuatan guna melawan monopoli perdagangan yang diberlakukan secara ketat oleh penjajah. Mobilitas kaum pedagang telah memberikan andil besar dalam menyebarkan perlawanan.

Persemaingan perlawanan telah merasuki aktivitas perdagangan yang secara praktis mampu bertransformasi menjadi kesadaran publik. Perlawanan tersebut, telah memasuki ruang-ruang yang lebih luas hingga mampu berkolaborasi dengan kaum-kaum terdidik. Lewat kepiawaian kaum-kaum terdidik perlawanan menjadi lebih artikulatif dan mampu memilih berbagai alternatif perlawanan.

Kaum-kaum terdidik telah melihat bahwa solusi atas keresahan ekonomi yang tengah dialami oleh bangsa Indonesia adalah kemerdekaan. Hanya kemerdekaan yang menjadi jalan menuju kesejahteraan. Tidak mudah untuk meraih kemerdekaan membutuhkan perjuangan dengan segenap kerelaan mengorbankan jiwa dan raga.

Menyadari betapa penting kemerdekaan itu guna menjadi jalan dalam meraih kesejahteraan. Soekarno dalam gagasan Marhaenisme menekankan betapa penting mengatur urusan kepemimpinan yang juga beriringan dengan urusan kesejahteraan. Sosio-demokrasi yang tidak meniru Barat melainkan demokrasi yang juga secara sadar mengatur persoalan kesejahteraan. Melepas urusan ekonomi dalam mekanisme pasar hanya akan menimbulkan pelanggaran ketimpangan ekonomi.

Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 menyampaikan keadilan sosial akan menghapus kemiskinan dari bangsa Indonesia. Sikap optimis yang ditunjukkan oleh Soekarno berakar

kuat dalam dasar negara yang diusulkannya yakni Pancasila. Negara Indonesia merdeka bagi Soekarno yang berpegang dengan lima sila Pancasila, bila diperas akan menghasilkan Triasila (sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan) dan bila Trisila diperas akan menghasilkan Ekasila (gotong royong).

Bila mencermati uraian Soekarno tersebut, kita dapat memahami bahwa kekuatan besar yang terkandung di dalam Pancasila adalah gotong royong. Soekarno bahkan menyatakan gotong royong lebih dinamis dibandingkan dengan kekeluargaan. Secara kultural pernyataan Soekarno tersebut, dapat dipahami berdasarkan kenyataan hidup bangsa Indonesia dengan kultur saling membantu antar sesama.

Kebiasaan saling membantu telah melampaui sekat keluarga, golongan, suku, budaya dan agama. Kehidupan gotong royong menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia di dalam mengelola sumber-sumber ekonomi. Hidup secara kolektif akan menutup ruang individualisme dan monopoli dalam aktivitas ekonomi.

Gotong royong menjadi ruang dalam akses ekonomi bersama dengan aktivitas saling berbagi dan memberdayakan yang lain. Aktivitas ekonomi bukan melahirkan jarak kepemilikan yang timpang melainkan yang berlebih berbagi kepada yang kurang. Dengan sendirinya aktivitas ekonomi tersebut, akan memberikan akses yang adil bagi semua.

Soekarno tentu telah memahami tantangan besar dalam mewujudkan aktivitas ekonomi berlandaskan Pancasila. Analisis tajam Soekarno dalam memahami perkembangan global khususnya terkait monopoli ekonomi kapitalis akan meninggalkan gaya lama (penjajahan/kolonialisme). Sedangkan gaya baru dari monopoli tersebut, berupa neo-kolonialisme dalam bentuk penguasaan sumber daya alam lewat korporasi dan pasar bebas serta penyedia hutang bagi negara-negara yang baru merdeka.

Soekarno sedari awal telah menganalisis kehadiran praktik-praktik neo-kolonialisme. Pancasila berlandaskan gotong royong menjadi leitstar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi kondisi tersebut. Terjerat dalam neo-kolonialisme hanya menjadikan kedaulatan negara sekedar ilusi semata, mengingat sumber daya alam terkuras oleh korporasi asing.

Ketahanan ekonomi dalam negeri menjadi labil dan rapuh dengan sistem pasar bebas. Negara berdaulat hanya akan menyaksikan pertarungan bebas pasar tanpa ada daya. Kondisi demikian terjadi, sebab aktivitas ekonomi menjadi domain individu membuat kolektivisme tidak mendapatkan ruang gerak.

Dalam tatanan ekonomi neo-kolonialisme aktivitas ekonomi berlandaskan Pancasila menjadi tidak berdaya. Jalan bagi ekonomi berlandaskan Pancasila hanya akan berdaya bila

kolektivisme menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Demi menjaga kolektivisme negara perlu mengambil langkah dalam menanamkan kesadaran bersama dalam tatanan yang jauh lebih nyata.

Kesadaran hidup sebagai makhluk sosial yang saling terpaut dan bergantung satu dengan lainnya menjadi penting ditanamkan kepada warga negara. Bila kita ingin hidup berdasarkan cita-cita kemerdekaan dengan mendirikan negara buat semua. Sehingga aktivitas ekonomi berlandaskan Pancasila akan memberikan kesadaran geopolitik dan geoekonomi, yang menyertai dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif di mana peneliti memilih objek Pustaka sebagai sumber data analisis untuk memperoleh dan mengetahui isi dan mendapatkan hasil penelitian. Kualitatif bermakna bahwa peneliti melakukan suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena terkait dengan focus kajian dalam penelitian ini. Pengumpulan data dari penelitian ini, yaitu dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan focus kajian. Kemudian, membaca dan mencari bagian yang lebih spesifik mengenai tema-tema yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Kemudian peneliti melakukan analisis mendalam terhadap sumber data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pancasila Sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan**

Bicara pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas yang mempertemukan penjual, pembeli dan barang. Dalam kehidupan sehari-hari pasar menjadi aktivitas sosial yang tidak dapat dihindarkan demi memenuhi kebutuhan. Karena itu, pasar juga memotret perilaku atau motif, gagasan dan nilai yang mendasari seseorang dalam memenuhi kebutuhannya (Rinawati, 2020; Styaningrum, 2021).

Gambaran perilaku atau motif, gagasan dan nilai dalam proses interaksi di pasar dapat diilustrasikan seperti seseorang membeli gawai didasarkan atas motif untuk mengikuti perkuliahan online, gagasan dibalik itu tentu soal pendidikan selama masa pandemi dan nilai yang diperoleh berupa kemudahan akses mengikuti perkuliahan. Sedangkan dalam tinjauan pasar dengan perilaku yang ditunjukkan oleh penjual juga tidak bisa terlepas dari perilaku atau motif, gagasan dan nilai. Jadi, pasar itu menjadi cerminan dari kehidupan sosial masyarakat.

Kehidupan pasar juga menunjukkan proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pasar juga mengalami berbagai bentuk transformasi dari yang bersifat tradisional sekedar

memenuhi kebutuhan sehari-hari, perkembangan pasar modern yang lebih menekankan kenyamanan pembeli seperti mall, pasar swalayan dan supermarket dan pasar yang tersedia dalam bentuk digital. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan dapat tercermin dalam aktivitas pasar hari ini apalagi di tengah kondisi pandemi (Ariani & Nurcahyo, 2014; Sidik et al., 2020). Tetapi, apakah transformasi pasar yang terjadi tidak menimbulkan masalah? Pernyataan bahwa pasar selalu menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Kenyataan itu dapat dijumpai bahkan tidak membutuhkan analisis ahli ekonomi untuk menyatakan itu. Pada saat keluar dari rumah dengan tujuan membeli kebutuhan sehari-hari juga dapat menunjukkan itu, apakah memilih membeli di warung kecil atau di supermarket? Pilihan yang sederhana seperti itu telah memberikan gambaran menyangkut persoalan pasar yang terjadi.

Persaingan antara penjual dengan modal kecil dan modal besar telah melahirkan ketimpangan bahkan lebih jauh telah melahirkan monopoli. Lalu, bagaimana nasib koperasi yang diharapkan sebagai soko guru ekonomi bangsa? Pelaku koperasi dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan akan mengalami kesulitan dalam kenyataannya. Mengingat pasar telah menjadi arena pertarungan dengan melahirkan kemampuan, kekuatan dan kekuasaan yang menempatkan monopoli pasar sedemikian berdaya. Hampir bisa dipastikan aktivitas pasar berbasis koperasi tidak dapat mengimbangi kekuatan monopoli yang terjadi (Fuadi, 2015; Mariana, 2012).

Pelaku koperasi yang berbasis kepada usaha mikro, kecil dan menengah menghadapi persaingan pasar yang tidak seimbang. Kenyataan ini sangat tidak bersesuaian dengan teori keseimbangan pasar yang menghendaki harga dan kuantitas dapat menghadirkan keadilan. Tetapi, persoalannya bagi pelaku usaha kecil dan menengah akan menghadapi kesulitan produksi serta akan berpengaruh kepada kemampuan menghasilkan barang. Berbeda dengan penjual dengan kemampuan modal yang besar mampu menghasilkan produksi dan memainkan harga di tingkat pemasaran. Efek dari itu berdampak kepada penetrasi pasar dengan kemampuan modal yang dimiliki dapat mematikan pesaing di pasar dan bisa juga melakukan kontrol terhadap pelaku-pelaku usaha kecil (Arliman S, 2017).

Teori keseimbangan pasar juga telah menunjukkan sesuatu yang berbanding terbalik dengan tidak adanya informasi yang simetris antar penjual dan pembeli. Rata-rata barang dihadirkan kepada konsumen tanpa ada informasi yang jelas, apalagi dengan kemampuan penetrasi pemodal besar bisa menghadirkan kemasan produk yang terkesan menarik. Tetapi, perkara yang terjadi sesungguhnya lewat kemampuan modal besar telah mengaburkan

informasi dalam memenangkan dominasi pasar. Rata-rata produk koperasi yang diolah secara rumahan harus menghadapi persaingan yang tidak seimbang.

Kalau mengacu kepada prinsip dasar teori keseimbangan pasar maka semua perilaku yang terjadi dalam interaksi di pasar haruslah ideal dengan semua pelaku harus jujur. Tetapi, apakah kondisi itu terjadi baik di Pasar Sentral maupun di pasar-pasar yang lain di seluruh pelosok tanah air? Justru perilaku yang sebaliknya terjadi apalagi dengan aktivitas pinjaman modal berbunga di pasar telah membuat pelaku koperasi semakin terhisap dan tidak berdaya.

### **Bagaimana koperasi dapat ditumbuhkan?**

Meski pernyataan bahwa pasar menjadi arena kompetisi, namun peran aktif dari pemerintah termasuk pemerintah daerah menjadi sangat penting. Ketimpangan yang terjadi antara pelaku pasar dengan modal besar dan pelaku usaha kecil mengah mengharuskan pemerintah di daerah secara aktif menghadirkan keadilan dalam aktivitas ekonomi di pasar. (Ompusunggu et al., 2023) Bila merujuk kedalam pidato 1 Juni Soekarno maka prinsip kesejahteraan yang diungkapkan bahwa “tidak ada kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia merdeka”. Sedangkan dalam Pembukaan UUD 1945 NRI (Negara Republik Indonesia) menyatakan bahwa “tujuan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat adil makmur”. Dengan demikian lewat Pancasila dan konstitusi telah mengamanatkan bagi pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial (Rosyada et al., 2018; Tunisa et al., 2024).

Tugas pemerintah untuk mengatur perekonomian dan melindungi ekonomi rakyat. Pemerintah harus berperan aktif dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat (Hidayatullah, 2015; Rafsanjani, 2017). Perspektif pemerintah daerah tidak boleh lagi menganggap bahwa perekonomian daerah hanya akan tumbuh dengan mengundang dan memberikan ruang bagi investor. Tetapi, harus ditumbuhkan kepercayaan dan kesempatan bagi para pelaku koperasi guna mampu berdaya saing. Pemerintah daerah dengan semua struktur yang dimiliki harus diarahkan dalam menumbuhkan koperasi yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat. Pelaku-pelaku koperasi harus diberikan pendampingan dan pemetaan pasar serta kemampuan menghasilkan produk yang berkualitas.

Arah kebijakan pemerintah harus berbasis ekosistem dengan model keberpihakan seperti itu klasifikasi dan bentuk dukungan akan sangat jelas serta nyata dalam menumbuhkan daya saing pelaku koperasi. Hal lain yang juga harus diperhatikan pemerintah jangan sampai masih terjebak dengan perspektif lama yang memberikan bantuan uang atau sejenisnya. Justru keberpihakan dengan model seperti itu akan melanggengkan budaya malas dan mematikan mentalitas kemandirian. Pemerintah harus mengambil bentuk keberpihakan kepada

pelaku-pelaku koperasi dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan dibidang koperasi yang secara spesifik berdasarkan ekosistemnya.

Pada tahap ketersediaan permodalan bagi pelaku koperasi harus ada peran pemerintah menjembatani antara pelaku-pelaku koperasi dengan akses modal kepada bank. Kalau pemerintah dapat mengambil peran secara optimal tentu pertumbuhan dan perkembangan koperasi akan memiliki peluang yang menjanjikan termasuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi selama pandemi berbasis ekonomi kerakyatan.

### **Bagaimana koperasi bertransformasi kedalam dunia digital?**

Perkembangan dunia digital telah demikian pesat dan pengaruhnya telah mempengaruhi perilaku termasuk didalam aktivitas jual-beli di pasar. Apabila dulu pasar berarti tempat melakukan interaksi antara penjual dan pembeli yang mengharuskan pertemuan secara langsung. Tetapi, dalam dunia digital aktivitas interaksi jual-beli dapat dilakukan secara online. Konektivitas yang memudahkan proses jual-beli membuat barang jualan telah berpindah kedalam lapak online.

Dunia digital memiliki kemampuan untuk dapat menjangkau pembeli yang tidak hanya satu kabupaten bahkan bisa menjangkau antar provinsi. Salah satu keunggulan dunia digital terletak kepada kemampuannya untuk menghubungkan orang yang berbeda tempat dan terpisah oleh jarak. Berdasarkan data pengguna digital khususnya media sosial di Indonesia menempatkan pengguna Youtube 93,8%, Whatsapp 87,7%, Instagram 86,6%, Facebook 85,5%, Twitter 63,6% dan Facebook Messenger 52,4% dan Tiktok 28,7% (Hootsuite). Data-data tersebut, dapat menjadi acuan bagi para pelaku-pelaku koperasi dalam bertransformasi kedalam dunia digital (Arifin et al., 2021; Dya Lestari et al., 2023; Sariyani et al., 2024).

Transformasi kedalam dunia digital dapat memperkuat dan mengembangkan perekonomian yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas. (Susilo et al., 2021; Wilestari et al., 2023). Kehadiran produk dan pengembangan koperasi berbasis ekosistem yang memungkinkan pertumbuhan secara sehat serta spesifikasi produk. Kalau para pelaku-pelaku koperasi mampu menyiapkan diri dengan produk yang lebih spesifik maka akan sangat sejalan dengan dunia digital yang memudahkan untuk ditemukan dalam mesin pencarian. Misalnya, *platform* youtube koperasi dengan produk olahan hasil pertanian dengan sajian konten-konten yang menarik (youtube hanya salah satu *platform* media sosial dimaksudkan hanya sebagai contoh). Tetapi, perlu dicatat bahwa konten-konten yang diupload hanya seputar produk olahan hasil pertanian, jangan sampai mengupload diluar dari itu. Mengapa hal seperti itu harus diperhatikan dalam dunia digital? Karena, dunia digital bekerja dengan algoritma yang

akan memudahkan apabila konten-konten dan promosi-promosi serta aktivitas lebih spesifik.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bergabung di e-commerce bertambah 6,5 juta sejak Mei 2020- Juni 2021 (Berita CNN 7/8). Selain data tersebut, Bank Indonesia juga mencatat bahwa sekitar 87,5% UMKM terkena dampak pandemi dan yang bertahan cenderung beralih ke digital (Berita ANTARA 27/10/2021). Kedua data tersebut, telah menunjukkan transformasi kedalam dunia digital dapat menjadi solusi apalagi di tengah pandemi sekaligus membuat pelaku-pelaku koperasi lebih adaptif dan kreatif dalam menghasilkan produk.

Pelaku-pelaku koperasi harus segera memasuki pasar digital yang dapat menjangkau pasar lebih luas (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021). Tetapi, hal yang harus diperhatikan dalam memasuki pasar digital yaitu kemampuan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan kompetitif serta menghadirkan trust atau kepercayaan (OECD, 2019). Memasuki pasar digital berarti menuntut tingkat trust yang tinggi sebagai pra-syarat bertahan dalam persaingan pasar digital (Gefen et al., 2003). Tidak ada yang jauh lebih penting daripada menjaga tingkat kepercayaan dan kemampuan pasar digital yang memberikan ruang bagi para pelaku-pelaku dunia usaha yang memegang teguh prinsip kejujuran dalam transaksinya (Loonam et al., 2018).

Selain itu, memasuki pasar digital juga membutuhkan dukungan dari pemerintah mengingat ada banyak pelaku-pelaku usaha baik dengan modal besar maupun modal kecil apalagi pelaku-pelaku koperasi yang masih dalam tahap pertumbuhan (World Bank, 2020). Karena itu, pemerintah daerah harus senantiasa memberikan dukungan yang jauh lebih ril dan memberikan peluang diikutkan dalam promosi-promosi pemerintah (Suharyanto, 2022). Misalnya, dalam promosi perlu mengikutsertakan pelaku-pelaku koperasi yang mengkolaborasikan antara parawisata dan produk-produk koperasi (Santoso, 2021). Dukungan yang seperti itu juga akan memberikan dampak luas dalam menumbuhkan ekonomi berbasis koperasi (ILO, 2017).

Selain itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait pembahasan mengenai koperasi dijabarkan dalam BAB V Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang memberikan kemudahan untuk membentuk koperasi paling sedikit 9 orang dan koperasi diposisikan sebagai agregator bagi UMKM (Kontan.co.id). Pengembangan koperasi dengan program-program yang berbasis digital telah

menjadi spirit guna menumbuhkan koperasi yang mampu kompetitif dalam pasar digital.

Mohammad Hatta sebagai penggagas koperasi mengharapkan koperasi dapat menjadi basis perkembangan ekonomi nasional (Andi Achdian, 2021: 10). Karena itu, koperasi harus mendapatkan ruang dan tempat dalam aktivitas perekonomian. Koperasi harus menjadi pelaku pasar yang utama bukan lagi ditempatkan menghuni bagian pinggiran di areal pasar termasuk di Pasar Sentral maupun di tempat lain. Pelaku koperasi tidak boleh jatuh ke dalam “pasar selalu menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan” permasalahan modal dan ketidakberdaya serta perlunya transformasi dalam dunia digital harus melibatkan semua kalangan.

## **KESIMPULAN**

Kuntowijoyo seorang sejarawan Indonesia dalam analisisnya menyebutkan bahwa keterlibatan umat Islam dalam sejarah Indonesia mulai dari fase munculnya Kerajaan Demak, fase Kolonial hingga fase kemerdekaan yang senantiasa berlanjut dan berulang. Kehadiran Islam di Indonesia ditandai dengan penyebaran Islam di kawasan pesisir. Peran dari para pedagang cukup besar dalam proses penyebaran Islam. Diterimanya Islam di kawasan pesisir tidak terlepas dari visi Islam yang mengakui persamaan hak antar manusia. Ketertarikan orang masuk Islam disebabkan oleh Islam tidak mengenal strata sosial seperti agama sebelumnya yang dianut oleh masyarakat. Akibatnya Islam dengan mudah diterima dikalangan pesisir yang banyak berprofesi sebagai pedagang.

Penerimaan Islam di kelas ekonomi menengah yang didominasi oleh pedagang lambat laun menjadi kekuatan secara sosial ekonomi dan politik. Hal tersebut, juga tidak terlepas dari merosotnya Kerajaan Majahpahit. Proses perkembangan Islam mengalami kemajuan yang demikian pesat membuat secara politik melahirkan Kerajaan Demak sebagai identitas politik Islam. Kelahiran Kerajaan Demak tidak terlepas dari kalangan pedagang Islam.

Secara perlahan Kerajaan Demak mengalami perkembangan dan menjadi kerajaan maritim. Yang tentunya aktifitas perdagangan yang banyak mewarnai kehidupan masyarakatnya. Kerajaan Demak pun dengan begitu cepat menyebarkan pengaruhnya keberbagai daerah. Laju perkembangan Kerajaan Demak mengalami rintangan dan gangguan dengan hadirnya para Kolonial Eropa seperti Portugis, Inggris dan Belanda. Menyebabkan Kerajaan Demak mengalami keterhambatan dalam aktifitas dagang.

Jatuhnya Malaka di tangan Portugis membuat Kerajaan Demak mengalami tantangan dalam proses perdagangan. Tetapi, upaya yang gigih dan mengerahkan berbagai kekuatan

demikian merebut Malaka dari tangan Portugis telah dicoba oleh Kerajaan Demak. Tetapi, selama tiga kali Kerajaan Demak mengupayakan hal tersebut, malah setelah ke-tiga kalinya Kerajaan Demak mengalami kemerosotan dan tidak muncul lagi sebagai kekuatan politik yang menjadi simbol politik Islam. Kemunculan Kerajaan Mataram yang berbasis di pedalaman Jawa yang memanfaatkan kultur agraris. Untuk menjadi penyedia dan pemasok beras, telah menjadi faktor yang turut serta menyebabkan kemunduran Kerajaan Demak. Sebab, menguatnya simbol-simbol lama yakni kalangan priyayi.

Masuknya pengaruh Kolonial Eropa dan bangkitnya kekuatan priyayi dengan lahirnya Kerajaan Mataram. Menyebabkan posisi Islam secara politik berada pada kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam bahasa Kuntowijoyo umat Islam mengalami marginalisasi-periferalisasi yang menjadikan Islam sering kali tampil sebagai pelopor aksi protes terhadap penguasa baik pada Pemerintah Kolonial Belanda maupun kepada penguasa priyayi lokal.

Ada banyak kasus yang menunjukkan berada pada pusaran ketegangan dengan pusat-pusat kekuasaan entah dengan Kolonial Belanda maupun kepada penguasa lokal. Kasus Haji Ahmad Mutamakin yang terjadi pada daerah kekuasaan Mataram, yang menyebabkan dijatuhi hukuman akibat dianggap menyimpang dan melawan arus utama antara penguasa dan penghulu agama yang pro-penguasa priyayi. Lain lagi, dengan kasus Haji Ahmad Rifai juga mengalami ketegangan dengan arus utama yang tentunya didukung oleh penguasa. Akibatnya Haji Ahmad Rifai dijatuhi hukuman oleh para penghulu agama.

Pada masa tumbuhnya kesadaran nasional Indonesia yang juga dimotori oleh umat Islam. Yang datang tidak lewat bangku sekolah yang disediakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Tetapi, lewat kesadaran kelas ekonomi menengah yang pedagang timbul kesadarannya akibat ketidakberpihakan Penjajah Belanda kepada Kaum Bumi Putra.

## **REFERENSI**

- Ariani, N. I., & Nurcahyo, O. H. (2014). Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 57126. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(April), 1–12.
- Arifin, F., Ulfiana, E., & Admojo, W. (2021). Optimalisasi Platform Digital Dalam Pembelajaran Daring Di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 21(1), 23–32. <https://doi.org/10.33830/ptjj.v22i2.1917.2021>
- Arliman S, L. (2017). Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum*

- Nasional*, 6(3), 387. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>
- Dya Lestari, E., Sukarno, G., & Timur, J. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Wadah Promosi Dan Penjualan Poduk UMKM Di Kelurahan Sananwetan Utilizing Social Media as a Platform for Promoting and Selling UMKM Products in Sananwetan Subdistrict. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 19–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/karunia.v2i3.1137>
- Fuadi, A. (2015). Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1). <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/190/185>
- Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. *MIS Quarterly*, 27(1), 51–90. <https://doi.org/10.2307/30036519>
- Hidayatullah, I. (2015). Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam. *Dinar*, 1, 77–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/dinar.v2i1.2691>
- International Labour Organization (ILO). (2017). *Cooperatives and the digital economy*. ILO.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2021). *Transformasi digital koperasi dan UMKM*. Kemenkop UKM.
- Loonam, J., Eaves, S., Kumar, V., & Parry, G. (2018). Towards digital transformation: Lessons learned from traditional organizations. *Strategic Change*, 27(2), 101–109. <https://doi.org/10.1002/jsc.2185>
- Mariana, K. (2012). Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pembangunan Nasional. *Informatika*, 3(I Januari), 15.
- OECD. (2019). *Enhancing SME access to diversified financing instruments*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264249498-en>
- Ompusunggu, D. P., Sutrisno, D. R. I., & Hukom, A. (2023). Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(1), 378–385. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1449>
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.942>
- Rinawati, A. (2020). Pancasila Dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi

- Kapitalisme Global. *Jurnal Terapung: Ilmu - Ilmu Sosial*, 2(2), 1–12.  
<https://doi.org/10.31602/jt.v2i2.3972>
- Rosyada, A., Warassih, E., & Herawati, R. (2018). Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>
- Santoso, B. (2021). Sinergi koperasi dan pariwisata dalam pengembangan ekonomi lokal. *Jurnal Koperasi Indonesia*, 9(2), 45–57.
- Sariani, N., Putra, R. D., & Wulandari, P. (2024). Survei Penggunaan Media Sosial di Kalangan Masyarakat Pasar Hongkong Kota Singkawang. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(3), 217–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i3.2879>
- Sidik, S., Hasrin, A., & Fathimah, S. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Waktu Operasional Pasar Di Kabupaten Minahasa Akibat Penanggulangan Covid-19. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3). <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i3.1160>
- Styaningrum, F. (2021). Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Umkm Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 565. <https://doi.org/10.24843/ceb.2021.v10.i08.p01>
- Suharyanto, T. (2022). Peran pemerintah daerah dalam penguatan koperasi di era digital. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 17(1), 33–49.
- Susilo, Y., Wijayanti, E., & Santoso, S. (2021). Penerapan Teknologi Digital Pada Ekonomi Kreatif Pada Bisnis Minuman Boba. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(4), 457–468. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i4.383>
- Tunisa, R. L., Asbari, M., Ahsyan, D., & Utami, U. R. (2024). Pendidikan: Kunci Keadilan Sosial. *JISMA: Journal of Information Systems and Management*, 03(02), 76–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.4444/jisma.v3i2.969>
- Wilestari, M., Mujiani, S., Sugiharto, B. H., Sutrisno, S., & Risdwiyanto, A. (2023). Digitalisasi dan Transformasi Bisnis: Perspektif Praktisi Muda UMKM tentang Perubahan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 259–268. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.61216>
- World Bank. (2020). *Digital economy for development in Indonesia*. World Bank Group.